

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menangkal Radikalisme di Kalangan Pelajar

(Studi Kasus di Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu)

Abdurrasyid^{1*}, Syamzaimar²

¹²Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia

*Correspondent email: abdurrasyid2525@gmail.com

Received: 27 April 2026 **Revised:** 15 Mei 2026 **Accepted:** 26 Juni 2026 **Published:** 11 Juli 2026

©2026 by the authors. Licensee Learning Strategies: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Abstract. *This study aims to analyze the role of Civic Education in preventing radicalism among students at Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Rokan Hulu Regency. Radicalism has become a serious challenge for educational institutions because it can influence the mindset of young people who are in the process of identity formation, particularly through the spread of intolerant, exclusive, and provocative narratives in social environments and digital media. This study employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design through library research. The data were obtained from books, scientific articles, educational documents, and previous studies relevant to Civic Education, radicalism, Pancasila values, digital literacy, and inclusive culture. The data were analyzed using content analysis to identify the role of Civic Education in strengthening students' ideological resilience. The findings indicate that Civic Education plays a strategic role as an instrument for character building, internalizing Pancasila values, fostering tolerance, and developing critical thinking in responding to radical propaganda. Dialogic, participatory, and critical discussion-based learning strategies, combined with national and digital literacy, are considered essential to strengthening students' resistance to radical ideologies. In addition, a democratic and inclusive campus culture serves as an important supporting factor in creating an educational environment that respects diversity. Therefore, Civic Education can function as a preventive medium in shaping students who are moderate, nationalistic, democratic, and strongly committed to preserving the unity of the Republic of Indonesia.*

Keywords: Civic Education; Radicalism; University Students; Pancasila; Inclusive Culture

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Radikalisme menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan karena dapat memengaruhi pola pikir generasi muda yang berada pada fase pencarian jati diri, terutama melalui penyebaran narasi intoleran, eksklusif, dan provokatif di lingkungan sosial maupun media digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dokumen pendidikan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan Pendidikan Kewarganegaraan, radikalisme, nilai Pancasila, literasi digital, dan budaya inklusif. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun ketahanan ideologis mahasiswa. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan strategis sebagai instrumen penguatan karakter, penanaman nilai Pancasila,

pembentukan sikap toleran, serta pengembangan nalar kritis dalam menghadapi propaganda radikal. Strategi pembelajaran yang dialogis, partisipatif, berbasis diskusi kritis, literasi kebangsaan, dan literasi digital dinilai penting untuk memperkuat daya tangkal mahasiswa terhadap paham radikal. Selain itu, budaya kampus yang demokratis dan inklusif menjadi faktor pendukung dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana preventif dalam membentuk mahasiswa yang moderat, nasionalis, demokratis, dan berkomitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan; Radikalisme; Mahasiswa; Pancasila; Budaya Inklusif

1. Pendahuluan

Sebagai negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional dari ancaman ideologi ekstrem. Radikalisme telah menjadi isu global yang tidak hanya mengancam keamanan fisik, tetapi juga merongrong fondasi ideologis bangsa. Dalam konteks nasional, fenomena ini menargetkan sendi-sendi persatuan yang selama ini dijaga oleh konsensus Pancasila. Pada tingkat yang lebih spesifik, dunia pendidikan kini berada dalam radar penyebaran paham radikal. Sekolah dan perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi tempat persemaian nilai-nilai kemanusiaan, justru sering kali menjadi sasaran empuk bagi kelompok-kelompok yang ingin mengganti tatanan demokrasi dengan ideologi eksklusif. Kerentanan ini semakin nyata ketika melihat data mengenai keterpaparan generasi muda terhadap narasi intoleransi (Casey et al., 2019).

Pelajar dan mahasiswa, sebagai kelompok yang berada dalam fase pencarian jati diri, memiliki rasa ingin tahu yang besar namun sering kali belum dibekali dengan filter ideologis yang kuat. Semangat perubahan yang membara pada jiwa muda kerap dimanipulasi oleh oknum radikal untuk kepentingan destruktif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah instrumen pendidikan yang mampu memberikan arah dan pegangan nilai yang kokoh. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya revolusi digital yang mengubah pola interaksi sosial. *Cyber-radicalism* atau radikalisme siber memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan propaganda secara cepat dan tak terbatas ruang. Pelajar yang sangat aktif di dunia maya menjadi sasaran utama konten-konten provokatif yang dikemas dengan narasi emosional (Aryeno et al., 2022).

Melihat urgensi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) muncul sebagai garda terdepan dalam upaya deradikalisasi di lingkungan pendidikan. PKn tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran hafalan, melainkan sebagai pendidikan nilai yang strategis. Melalui kurikulumnya, PKn berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan tantangan kekinian. Secara filosofis, PKn berakar pada nilai-nilai Pancasila yang

menekankan pada Ketuhanan yang berkemanusiaan dan persatuan yang berkeadilan. Nilai-nilai ini harus diinternalisasi agar menjadi bagian dari karakter siswa, bukan sekadar pengetahuan kognitif (Sanjaya, 2006). Penguatan karakter ini menjadi kunci utama dalam membangun daya tahan mental menghadapi doktrin luar.

Namun, implementasi PKn di lapangan masih menghadapi berbagai kendala metodologis. Sering kali, pengajaran yang bersifat kaku dan searah gagal menarik minat siswa untuk mendalami makna kewarganegaraan yang sebenarnya. Diperlukan transformasi besar dalam cara guru atau dosen menyampaikan materi agar tetap relevan dengan karakteristik Generasi Z (Fitri et al., 2023). Literasi digital dan nalar kritis menjadi dua pilar yang harus ditekankan dalam pembelajaran PKn modern. Siswa harus diajak untuk mampu membedakan mana aspirasi perubahan yang sehat dan mana ajakan yang mengarah pada tindakan anarkis atau radikal. Tanpa kemampuan analisis ini, pendidikan hanya akan menghasilkan warga negara yang pasif terhadap arus informasi.

Selain aspek kurikulum, budaya sekolah secara keseluruhan juga harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas dan demokrasi. Lingkungan yang menghargai perbedaan akan secara otomatis menolak benih-benih prasangka sosial yang menjadi akar radikalisme. Sinergi antara pengajaran di kelas dan praktik sosial di sekolah adalah kombinasi ideal dalam menangkal ekstremisme.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas lebih mendalam mengenai bagaimana PKn berperan dalam menangkal radikalisme melalui tiga perspektif utama: landasan filosofis, strategi metodologis, dan implementasi budaya inklusif. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan rumusan efektif untuk memperkuat ketahanan nasional melalui jalur pendidikan. Tujuan akhirnya adalah memastikan generasi masa depan tetap setia pada nilai-nilai persatuan Indonesia di tengah arus ideologi global yang dinamis.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai landasan filosofis, strategi metodologis, serta implementasi budaya inklusif

dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Lokasi penelitian ini adalah Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi perguruan tinggi sebagai ruang pendidikan, pembentukan karakter, penguatan nilai kebangsaan, dan internalisasi sikap moderat pada mahasiswa. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama yang lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan peran Pendidikan Kewarganegaraan secara kritis dan kontekstual dalam membangun sikap toleransi, nasionalisme, dan anti-radikalisme pada mahasiswa.

Landasan filosofis penelitian ini berpijak pada nilai-nilai Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, dan konsep *civic education* yang menempatkan mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum, moral, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai sarana pembentukan karakter bangsa yang menanamkan sikap moderat, toleran, demokratis, dan cinta tanah air. Dalam perspektif ini, radikalisme dipahami sebagai paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan, keberagaman, dan semangat persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, PKn memiliki fungsi strategis dalam membangun ketahanan ideologis mahasiswa melalui internalisasi nilai persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, penguatan identitas nasional, serta pemahaman terhadap pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga mengacu pada teori pendidikan karakter dan teori integrasi sosial yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai media pembentukan perilaku inklusif di lingkungan perguruan tinggi.

Strategi metodologis penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen pendidikan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengklasifikasikan, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan radikalisme di kalangan mahasiswa. Sumber data primer diperoleh dari buku-buku Pendidikan Kewarganegaraan, kebijakan pemerintah tentang pendidikan karakter, serta penelitian terdahulu mengenai radikalisme di lingkungan pendidikan. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari artikel ilmiah, jurnal nasional, dan referensi lain yang mendukung

pembahasan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, menafsirkan, dan menyimpulkan isi data berdasarkan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai strategi PKn dalam menangkal radikalisme.

Implementasi budaya inklusif dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan sosial mahasiswa. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membangun budaya inklusif melalui pembelajaran demokratis, diskusi kritis, kerja sama sosial, kegiatan akademik, serta penguatan sikap toleransi di lingkungan kampus. Nilai-nilai inklusif tersebut dapat diterapkan melalui proses pembelajaran, organisasi kemahasiswaan, kegiatan keagamaan, maupun aktivitas sosial yang melibatkan mahasiswa tanpa diskriminasi. Dengan budaya kampus yang inklusif, mahasiswa dapat belajar menghargai perbedaan, mengembangkan nalar kritis, serta menolak paham radikal yang bersifat intoleran, eksklusif, dan bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menangkal radikalisme tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Landasan Filosofis PKn sebagai Instrumen Penguatan Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang posisi krusial sebagai fondasi ideologis dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang secara filosofis bertujuan untuk membentuk jati diri warga negara yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam konteks pencegahan radikalisme, PKn tidak sekadar berfungsi sebagai mata pelajaran formal, melainkan sebagai instrumen strategis yang menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral terhadap negara. Dasar filosofis ini menempatkan Pancasila sebagai penyaring atau filter utama bagi setiap pengaruh ideologi luar yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Keberadaan PKn menjadi sangat relevan mengingat perannya dalam memperkuat karakter siswa agar memiliki ketahanan ideologis yang kokoh di tengah arus globalisasi (Asmaroini 2016).

Radikalisme di kalangan pelajar muncul sebagai fenomena yang mengkhawatirkan, sering kali dipicu oleh rasa ketidakpuasan sosial serta keterasingan identitas di era digital. Sebagai respon terhadap ancaman tersebut, PKn hadir dengan misi penguatan nilai-nilai inklusif seperti toleransi, pluralisme, dan demokrasi yang menjadi inti dari setiap sila Pancasila. Sila "Persatuan Indonesia", misalnya, memberikan landasan filosofis bagi pelajar untuk melihat keberagaman bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan nasional yang harus dijaga dari doktrin-doktrin eksklusivitas. Dengan demikian, PKn berfungsi sebagai "vaksin" mental yang mencegah masuknya paham ekstremis yang mencoba mengganti tatanan sosial yang sudah mapan (Indonesia 2017).

Secara substansial, urgensi PKn terletak pada kemampuannya untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan secara sistematis dan terukur guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ideologi negara, pelajar diharapkan tidak hanya menguasai teori kewarganegaraan, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam perilaku sehari-hari yang menghargai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi tameng utama dalam menangkal propaganda radikal yang sering kali memanfaatkan narasi ketidakadilan untuk merekrut generasi muda. Pendidikan yang dirancang secara kontekstual ini sangat penting agar nilai-nilai nasional tetap relevan dengan tantangan zaman (Budimansyah 2010).

Peran pendidik dalam PKn juga menjadi aspek filosofis yang tidak terpisahkan, di mana guru bertindak sebagai agen perdamaian dan teladan dalam menghormati perbedaan. Guru PKn dituntut untuk mampu mengidentifikasi kerentanan siswa terhadap paham radikal serta menjadi motivator dalam membangun resiliensi di lingkungan sekolah. Hubungan antara pendidik dan peserta didik dalam ruang kelas PKn harus didasarkan pada prinsip dialogis dan partisipatif agar siswa merasa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi kritis mereka tanpa harus beralih ke jalur radikalisasi. Keteladanan guru menjadi kunci agar nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran kognitif semata (Syamzaimar 2025).

Tantangan radikalisme saat ini semakin kompleks dengan adanya eksposur informasi negatif di media sosial yang mampu mengubah pola pikir pelajar secara cepat. Dalam menghadapi realitas ini, PKn secara filosofis diarahkan untuk membangun nalar kritis sehingga siswa mampu memilah informasi dan membedakan antara aspirasi

perubahan yang demokratis dengan ajakan radikalisme yang anarkis. Kemampuan berpikir kritis yang diajarkan dalam PKn membantu pelajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau narasi ekstremisme yang sering tersebar luas di dunia maya. Penguatan nalar ini merupakan bentuk pertahanan diri yang paling efektif bagi generasi milenial (Fitri dkk. 2023).

Penerapan PKn di sekolah, terutama pada tingkat dasar dan menengah, harus dilakukan secara konsisten dan inovatif guna menarik perhatian serta menumbuhkan kesadaran sosial siswa sejak dini. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok dan permainan edukatif, terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Dengan menanamkan prinsip-prinsip ketuhanan yang berkemanusiaan dan persatuan yang berkeadilan sejak dini, sekolah dapat menciptakan ekosistem yang menolak segala bentuk kekerasan dan intoleransi. Fondasi ini sangat menentukan kualitas karakter warga negara di masa depan (Sanjaya 2006).

Sebagai kesimpulan dari landasan filosofis ini, PKn bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan, melainkan proses pembudayaan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar bagi masa depan negara yang harmonis. Ketahanan nasional Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana generasi muda mampu menyerap dan mempraktikkan ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup dalam menghadapi dinamika global yang penuh dengan ancaman ekstremisme. Oleh karena itu, penguatan kurikulum PKn yang berbasis karakter menjadi agenda yang mutlak harus diprioritaskan demi menjaga kedaulatan mental bangsa. Melalui sinergi antara teori dan praktik, PKn akan terus menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Cogan dan Derricott 2014).

Strategi Pembelajaran PKn Berbasis Diskusi Kritis dan Literasi Kebangsaan

Transformasi metodologi dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi kebutuhan mendesak di tengah masifnya penyebaran paham ekstremisme yang menyasar generasi muda melalui ruang digital. Strategi pembelajaran PKn kini tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan transfer pengetahuan secara searah, melainkan harus mampu membangun ketahanan ideologis melalui pendekatan yang lebih dinamis. Efektivitas PKn dalam menangkal radikalisme sangat bergantung pada sejauh mana kurikulum mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan realitas

tantangan global yang dihadapi siswa sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan kurikulum PKn menjadi solusi strategis dalam membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menolak narasi radikal (Fajri dkk. 2021).

Salah satu strategi utama dalam modernisasi PKn adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) siswa agar mampu menyaring informasi radikal yang beredar luas di media sosial. Berpikir kritis memungkinkan pelajar untuk mengevaluasi setiap konten yang mereka terima, memahami bias, dan mengenali pola propaganda ekstremis yang sering kali dikemas dengan narasi emosional. Dengan nalar yang kritis, siswa tidak akan menjadi penerima informasi yang pasif, melainkan menjadi subjek yang aktif dalam mempertahankan integritas berpikirnya dari pengaruh negatif. Hal ini menjadikan berpikir kritis sebagai salah satu pilar utama dalam upaya pencegahan ekstremisme di sekolah (Ennis 2018).

Implementasi literasi digital dalam pembelajaran PKn juga menjadi komponen krusial mengingat media sosial kini menjadi medan utama penyebaran ideologi ekstrem. Pelajar yang memiliki literasi digital yang baik akan mampu membedakan antara informasi yang valid dengan hoaks atau narasi kebencian yang memecah belah persatuan. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam memberikan panduan etis dan moral bagi siswa dalam berinteraksi di dunia maya, sehingga mereka tetap menjunjung tinggi nilai kesantunan dan persatuan bangsa. Tanpa literasi digital yang memadai, penguasaan teori kewarganegaraan akan kehilangan relevansinya di hadapan deras arus informasi digital (Hidayat 2025).

Metode pembelajaran interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan pemecahan masalah (*problem solving*) terbukti lebih efektif dalam menanamkan kesadaran akan bahaya radikalisme. Melalui diskusi yang terbuka, siswa diajak untuk melihat keberagaman dari berbagai perspektif dan memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman bagi stabilitas nasional. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat secara demokratis sekaligus melatih mereka untuk menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Interaksi yang sehat di ruang kelas menjadi miniatur dari kehidupan bernegara yang inklusif dan toleran (Casey dan Fernandez-Rio 2019).

Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang inovatif seperti video edukatif dan permainan peran (*role playing*) dapat menarik minat siswa untuk mendalami nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam. Siswa cenderung lebih mudah menginternalisasi

nilai-nilai kebangsaan ketika mereka terlibat langsung dalam proses simulasi pengambilan keputusan yang berbasis pada keadilan dan musyawarah. Pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual akan membuat pesan-pesan perdamaian lebih membekas di hati pelajar dibandingkan dengan metode hafalan yang membosankan. Inovasi metode ini sangat menentukan keberhasilan PKn sebagai tameng ideologis bangsa (Sardiman 2011).

Peran guru PKn dalam strategi ini sangat vital, di mana mereka harus mampu bertransformasi menjadi fasilitator yang inspiratif dan teladan dalam bersikap toleran. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi pengembangan karakter positif siswa. Keteladanan guru dalam menghargai perbedaan di sekolah memberikan bukti nyata bagi siswa bahwa nilai-nilai yang dipelajari dalam buku teks memang dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Tanpa bimbingan guru yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, strategi pembelajaran PKn akan sulit mencapai tujuannya (Syamzaimar 2025).

Lebih lanjut, penguatan sikap inklusif dan toleransi harus menjadi napas dalam setiap aktivitas pembelajaran PKn guna menangkal doktrin eksklusivitas radikal. Siswa harus didorong untuk berinteraksi lintas kelompok dan memahami pluralisme sebagai jati diri bangsa Indonesia yang tidak boleh digantikan oleh ideologi manapun. Melalui pemahaman yang inklusif, pelajar akan memiliki imunitas alami terhadap ajakan kelompok radikal yang sering kali menanamkan kebencian terhadap kelompok lain. Inklusivitas inilah yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Tantangan radikalisme non-kekerasan yang sering kali luput dari perhatian juga harus mulai diintegrasikan dalam pembahasan di kelas PKn. Pelajar perlu diberi pemahaman bahwa radikalisme tidak selalu muncul dalam bentuk aksi anarkis, tetapi juga bisa berawal dari sikap intoleran dan penolakan terhadap konsensus nasional. Dengan mengenali ciri-ciri radikalisme sejak dini, siswa dapat lebih waspada terhadap lingkungan pergaulan mereka yang mungkin sudah mulai terpapar paham tersebut. Deteksi dini ini merupakan langkah preventif yang sangat efektif di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi (Aryeno dkk. 2022).

Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat juga menjadi bagian dari strategi besar PKn dalam menciptakan ekosistem anti-radikalisme yang komprehensif.

Pendidikan di sekolah tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh lingkungan rumah yang juga menanamkan nilai-nilai moderasi dan keterbukaan. PKn harus mampu menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan antara teori di sekolah dengan praktik sosial di tengah masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan ini akan memperkuat daya tangkal kolektif bangsa terhadap ancaman ekstremisme yang terus berevolusi (Lensa dkk. 2025a).

Sebagai penutup, keberhasilan strategi pembelajaran PKn dalam menangkal radikalisme diukur dari sejauh mana siswa mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kritis, dan cinta damai. Dengan mengombinasikan literasi digital, nalar kritis, dan internalisasi nilai Pancasila, PKn bertransformasi menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keutuhan NKRI. Generasi muda yang memiliki ketahanan ideologis yang kuat adalah jaminan bagi kelangsungan demokrasi dan persatuan di masa depan. Oleh karena itu, inovasi dalam PKn harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjawab dinamika tantangan zaman yang semakin kompleks (Rahmatiani 2020). Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Implementasi Budaya Demokrasi dan Sikap Inklusif dalam Lingkungan Sekolah

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan merupakan langkah krusial untuk mentransformasi pemahaman teoretis menjadi perilaku nyata yang anti-radikal. Di tingkat sekolah, peran guru PKn menjadi sangat vital bukan hanya sebagai pengajar materi, tetapi sebagai penggerak internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mampu menekan angka perundungan dan intoleransi antar-siswa. Fenomena seperti mengejek perbedaan agama atau warna kulit sering kali menjadi pintu masuk awal bagi sikap radikal yang lebih ekstrem, sehingga intervensi melalui budaya sekolah yang inklusif menjadi mutlak

diperlukan. Dengan mengaitkan materi PKn langsung pada tindakan praktis, sekolah dapat menciptakan ekosistem yang menghargai keberagaman secara alami(Syamzaimar 2025).

Di SMP Wahidiyah Karangrejo, misalnya, keberhasilan internalisasi nilai Pancasila ditunjukkan melalui pembiasaan kegiatan keagamaan kolektif yang inklusif serta penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi oleh guru. Pengamalan nilai-nilai ini terbukti mampu membangun kesadaran siswa bahwa pendapat pribadi tidak selalu merupakan kebenaran mutlak, sehingga menumbuhkan kerendahan hati dalam berinteraksi. Budaya demokrasi yang diterapkan di kelas melalui diskusi terbuka memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menghargai perbedaan pandangan tanpa rasa takut. Praktik-praktik kecil inilah yang secara akumulatif membangun resiliensi siswa terhadap doktrin radikalisme yang biasanya bersifat tertutup dan eksklusif(Rahmawati dan Raharjo 2025).

Pada jenjang perguruan tinggi, PKn memiliki tanggung jawab strategis dalam membekali Generasi Z yang hidup di era digital dengan nilai-nilai toleransi dan nasionalisme yang adaptif. Penelitian di Universitas Pattimura menunjukkan bahwa PKn berkontribusi positif dalam membangun kesadaran dini mahasiswa terhadap ancaman radikalisme melalui pemahaman mendalam tentang NKRI dan Hak Asasi Manusia. Mahasiswa didorong untuk tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, tetapi juga berperan sebagai agen perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui pendidikan yang dialogis, kampus berubah menjadi laboratorium demokrasi yang efektif dalam menangkal penyebaran ideologi ekstrem (Nurul'Ainy 2021).

Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah maraknya *cyber radicalism* yang menysar kerentanan remaja melalui platform media sosial seperti TikTok dan Instagram. Pendidikan Kewarganegaraan harus hadir dengan inovasi metode pengajaran yang mengintegrasikan literasi digital agar siswa mampu membedakan narasi ekstremis dari informasi valid. Berdasarkan analisis kritis, pendidikan yang mampu berkolaborasi dengan dinamika ruang publik digital dapat meningkatkan ketahanan ideologis siswa hingga mencapai efektivitas yang signifikan. Tanpa integrasi literasi digital, nilai-nilai inklusivitas yang diajarkan di kelas akan mudah runtuh oleh propaganda radikal yang tersebar masif di dunia maya(Rustandi 2024).

Selain pembelajaran di kelas, organisasi kemahasiswaan dan pemanfaatan media digital secara positif memegang peranan penting dalam memperkuat moderasi beragama. Aktivitas organisasi yang berbasis pada kepemimpinan demokratis melatih mahasiswa untuk mempraktikkan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan nilai sila keempat Pancasila yang menekankan kebijaksanaan dalam permusyawaratan sebagai penangkal sikap otoriter dan radikal. Ketika mahasiswa terbiasa dengan iklim organisasi yang inklusif, mereka akan memiliki benteng mental yang kuat saat berhadapan dengan ajakan kelompok garis keras (Pramanda dkk. 2018).

Resiliensi terhadap radikalisme juga dibangun melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus yang mengajak siswa terjun langsung memahami realitas sosial. Metode *experiential learning* memungkinkan pelajar merasakan langsung dampak dari konflik akibat intoleransi, sehingga menumbuhkan empati yang mendalam terhadap sesama manusia. Empati ini merupakan musuh utama radikalisme yang sering kali menanggalkan sisi kemanusiaan demi ambisi ideologis tertentu. Dengan demikian, PKn berhasil mengubah pola pikir dari yang semula egosentris menjadi sosiosentris yang peduli terhadap keutuhan bangsa (Kolb dan Kolb 2018).

Implementasi PKn yang efektif juga menuntut adanya sinergi antara dosen, universitas, dan kesadaran aktif dari mahasiswa itu sendiri. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, seperti yang diteliti di Universitas Negeri Makassar, menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap Pancasila sebagai filter ideologi sangat menentukan daya tahan mereka terhadap narasi radikal digital. Mahasiswa yang menyadari relevansi Pancasila sebagai pedoman hidup cenderung lebih waspada terhadap eksklusivisme dan intoleransi di lingkungan kampus. Sinergi ini memastikan bahwa upaya pencegahan radikalisme dilakukan secara komprehensif dari berbagai lini kehidupan akademik (Rahmawati dan Raharjo 2025).

Dalam konteks pelajar sekolah menengah, PKn berperan sebagai benteng ideologi melalui pembelajaran yang kontekstual dan mampu menjawab kegelisahan jati diri remaja. Pelajar yang sedang dalam fase pencarian identitas sangat rentan terpapar paham radikal jika tidak memiliki pegangan nilai yang kuat. Melalui penanaman karakter warga negara yang bertanggung jawab, PKn memberikan arah yang jelas bagi siswa untuk berkontribusi positif bagi negara ketimbang terjerumus dalam aksi

ekstremisme. Pembentukan karakter ini adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas nasional(Winarno 2006).

Lebih lanjut, keterlibatan aktif dalam budaya sekolah yang menghargai kemajemukan dapat mengikis benih-benih prasangka sosial yang sering menjadi akar radikalisme. Ketika sekolah secara sadar merayakan perbedaan budaya dan agama dalam kegiatan-kegiatannya, siswa akan melihat keberagaman sebagai sesuatu yang indah dan patut dijaga. PKn memberikan landasan hukum dan moral bagi praktik inklusivitas tersebut sehingga siswa merasa bangga dengan identitas bangsa Indonesia yang plural. Kebanggaan ini menjadi modal sosial yang kuat untuk menolak segala bentuk upaya pecah belah oleh kelompok radikal(Lensa dkk. 2025).

Sebagai kesimpulan, efektivitas PKn dalam menangkal radikalisme sangat bergantung pada konsistensi antara teori yang diajarkan dengan budaya yang dipraktikkan di lingkungan pendidikan. PKn yang transformatif dan kolaboratif akan mampu melahirkan generasi yang memiliki imunitas ideologi yang kuat serta keterampilan digital yang bertanggung jawab. Dengan menjadikan inklusivitas dan demokrasi sebagai napas dalam kehidupan sekolah dan kampus, keutuhan NKRI akan tetap terjaga di tangan generasi mendatang.Tugas kolektif kita adalah memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi hidup dalam sanubari setiap pelajar Indonesia(Syamzaimar 2025).

3.2 Pembahasan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa karena mata kuliah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan tentang negara, konstitusi, hak, dan kewajiban warga negara, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter kebangsaan. Dalam konteks Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat kesadaran mahasiswa agar memiliki sikap nasionalis, toleran, demokratis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar utama dalam membentuk ketahanan ideologis mahasiswa sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh paham yang bersifat ekstrem, intoleran, dan bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan fondasi ideologis dalam sistem pendidikan nasional yang

bertujuan membentuk jati diri warga negara sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila (Asmaroini, 2016).

Radikalisme merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan karena dapat memengaruhi pola pikir generasi muda yang sedang berada dalam fase pencarian identitas. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun pada saat yang sama juga dapat menjadi sasaran penyebaran ideologi eksklusif apabila tidak dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang kuat. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi media penting untuk menanamkan kesadaran bahwa keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan sosial merupakan realitas bangsa Indonesia yang harus dijaga. Nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekayaan nasional yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Indonesia, 2017).

Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kebangsaan secara sistematis. Melalui pembelajaran PKn, mahasiswa diarahkan untuk memahami bahwa cinta tanah air, penghormatan terhadap hukum, demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial merupakan bagian penting dari identitas warga negara. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi benteng dalam menghadapi propaganda radikal yang sering memanfaatkan isu ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan sentimen identitas untuk memengaruhi generasi muda. Oleh karena itu, PKn perlu dikembangkan sebagai pendidikan nilai yang kontekstual agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Budimansyah, 2010).

Peran dosen atau pendidik dalam Pendidikan Kewarganegaraan sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter anti-radikalisme. Dosen tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan dalam menampilkan sikap demokratis, moderat, dan menghargai perbedaan. Pembelajaran PKn yang bersifat dialogis memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, menguji gagasan, dan memahami pandangan yang berbeda secara sehat. Pola pembelajaran seperti ini penting karena radikalisme sering tumbuh dari cara berpikir tertutup, eksklusif, dan menolak dialog. Keteladanan pendidik dalam membangun suasana akademik yang terbuka menjadi bagian penting dari proses internalisasi nilai Pancasila (Syamzaimar, 2025).

Tantangan pencegahan radikalisme semakin kompleks dengan berkembangnya media digital. Penyebaran paham radikal tidak lagi hanya terjadi melalui pertemuan langsung, tetapi juga melalui media sosial, video pendek, forum daring, dan konten digital yang dikemas secara emosional. Mahasiswa yang aktif menggunakan media digital perlu memiliki kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah menerima informasi secara mentah. Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan dalam membangun nalar kritis mahasiswa sehingga mereka mampu membedakan antara kritik sosial yang demokratis dengan ajakan yang mengarah pada kebencian, intoleransi, dan kekerasan. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu bentuk pertahanan diri yang penting dalam menghadapi hoaks dan narasi ekstremisme di ruang digital (Fitri dkk., 2023; Ennis, 2018).

Strategi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan pada pendekatan yang aktif, partisipatif, dan kontekstual. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada hafalan kurang efektif untuk membentuk kesadaran anti-radikalisme. Oleh karena itu, dosen perlu menggunakan metode diskusi kelompok, studi kasus, pemecahan masalah, dan refleksi nilai agar mahasiswa dapat memahami persoalan radikalisme secara lebih kritis. Melalui diskusi, mahasiswa belajar menyampaikan pendapat secara rasional, menghormati pandangan orang lain, dan menyelesaikan perbedaan melalui cara-cara demokratis. Strategi ini penting karena penguatan kurikulum PKn harus mampu mengintegrasikan nilai kebangsaan dengan tantangan sosial yang dihadapi mahasiswa dalam kehidupan nyata (Fajri dkk., 2021; Casey dan Fernandez-Rio, 2019).

Literasi kebangsaan dan literasi digital menjadi dua aspek penting dalam pembelajaran PKn modern. Literasi kebangsaan membantu mahasiswa memahami sejarah bangsa, nilai persatuan, makna Pancasila, dan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, literasi digital membantu mahasiswa mengenali informasi yang valid, menghindari hoaks, memahami pola propaganda, serta menjaga etika komunikasi di ruang digital. Tanpa literasi digital yang memadai, mahasiswa dapat lebih mudah terpapar narasi provokatif yang menyebar melalui media sosial. Oleh karena itu, integrasi literasi digital dalam Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga warga digital yang kritis dan bertanggung jawab (Hidayat, 2025; Rustandi, 2024).

Selain strategi pembelajaran, budaya kampus yang inklusif juga menjadi faktor penting dalam menangkal radikalisme. Lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman dapat membentuk kebiasaan sosial yang toleran dan demokratis. Di lingkungan Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, budaya kampus yang inklusif dapat dikembangkan melalui kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, kegiatan keagamaan, dan aktivitas sosial yang melibatkan mahasiswa tanpa diskriminasi. Nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan perlu berjalan secara seimbang agar mahasiswa memiliki karakter religius sekaligus nasionalis. Budaya inklusif dapat membantu mahasiswa memahami bahwa sikap beragama yang baik tidak bertentangan dengan sikap toleran, moderat, dan menghargai kemajemukan (Rahmawati dan Raharjo, 2025).

Organisasi kemahasiswaan juga dapat menjadi ruang strategis dalam memperkuat sikap demokratis dan anti-radikalisme. Melalui organisasi, mahasiswa belajar bermusyawarah, memimpin, bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan menghargai keputusan bersama. Pengalaman tersebut dapat membentuk karakter mahasiswa yang terbuka dan bertanggung jawab. Apabila organisasi dikelola dengan prinsip demokratis dan inklusif, maka organisasi kemahasiswaan dapat menjadi sarana pembentukan karakter kebangsaan. Sebaliknya, ruang organisasi yang tidak diarahkan dengan baik dapat berpotensi menjadi tempat masuknya ideologi eksklusif. Oleh sebab itu, pembinaan organisasi mahasiswa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap menanamkan nilai Pancasila, moderasi, dan tanggung jawab sosial (Pramanda dkk., 2018).

Pembelajaran berbasis pengalaman, studi kasus, dan proyek sosial juga dapat memperkuat empati mahasiswa terhadap realitas kehidupan masyarakat. Mahasiswa perlu diajak memahami dampak negatif intoleransi, konflik sosial, ujaran kebencian, dan kekerasan atas nama ideologi. Melalui pengalaman belajar yang kontekstual, mahasiswa dapat mengembangkan sikap peduli, empati, dan tanggung jawab terhadap sesama. Sikap empati menjadi penting karena radikalisme sering kali tumbuh dari hilangnya penghargaan terhadap kemanusiaan dan perbedaan. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya membentuk kecerdasan kognitif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan sosial mahasiswa (Kolb dan Kolb, 2018; Winarno, 2006).

Pencegahan radikalisme juga membutuhkan sinergi antara kampus, dosen, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan

berjalan optimal apabila nilai-nilai yang diajarkan di kelas tidak didukung oleh lingkungan sosial yang kondusif. Kampus perlu membangun kebijakan akademik yang mendorong toleransi, dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dosen berperan membimbing mahasiswa agar memiliki nalar kritis dan sikap moderat, sedangkan mahasiswa berperan aktif dalam menjaga pergaulan, memilih informasi secara bijak, dan menolak ajakan yang mengarah pada kekerasan atau kebencian. Kolaborasi antara berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu menangkal radikalisme secara komprehensif (Lensa dkk., 2025a; Rahmatiani, 2020).

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme melalui penguatan nilai Pancasila, pembentukan karakter toleran, pengembangan nalar kritis, peningkatan literasi digital, dan penciptaan budaya kampus yang inklusif. Dalam konteks Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana preventif untuk membentuk mahasiswa yang religius, moderat, nasionalis, demokratis, dan berkomitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan PKn dalam menangkal radikalisme tidak hanya bergantung pada materi pembelajaran, tetapi juga pada konsistensi penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan akademik, organisasi, dan interaksi sosial mahasiswa sehari-hari (Nurul'Ainy, 2021; Aryeno dkk., 2022; Lensa dkk., 2025).

4. Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan hasil kajian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah formal, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan ketahanan ideologis mahasiswa agar mampu memahami identitas nasional serta menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi instrumen strategis untuk membentuk mahasiswa yang religius, moderat, nasionalis, demokratis, dan

terbuka terhadap perbedaan. Melalui penanaman nilai Pancasila, cinta tanah air, semangat persatuan, dan penghargaan terhadap kemajemukan, mahasiswa diharapkan memiliki daya tangkal yang kuat terhadap pengaruh paham radikal yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital.

Landasan filosofis Pendidikan Kewarganegaraan menunjukkan bahwa pendidikan memiliki tanggung jawab dalam membentuk warga negara yang kritis, berakhlak, demokratis, dan anti-kekerasan. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam membangun sikap toleran, menghargai perbedaan, menolak tindakan intoleran, serta mencegah berkembangnya paham eksklusif yang dapat merusak persatuan bangsa. Selain itu, strategi pembelajaran yang aktif, dialogis, partisipatif, dan berbasis nilai dapat membantu mahasiswa mengembangkan pola pikir terbuka dan rasional dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif.

Implementasi budaya kampus yang inklusif juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencegahan radikalisme. Lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman agama, budaya, dan pandangan sosial mampu menciptakan hubungan yang harmonis antarmahasiswa. Budaya inklusif tersebut mendorong tumbuhnya sikap saling menghormati, toleransi, solidaritas sosial, serta kesadaran untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana preventif dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, moderat, dan memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual, dialogis, dan relevan dengan kehidupan mahasiswa. Dosen perlu mengintegrasikan isu-isu aktual seperti radikalisme digital, intoleransi, hoaks, ujaran kebencian, dan pentingnya moderasi beragama ke dalam proses pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami persoalan kebangsaan secara kritis dan nyata.

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pengaraian juga diharapkan dapat memperkuat budaya kampus yang demokratis dan inklusif melalui kegiatan akademik, organisasi kemahasiswaan, kegiatan keagamaan, serta aktivitas sosial yang menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, dan cinta tanah air. Selain itu, mahasiswa

perlu didorong untuk meningkatkan literasi digital agar mampu menyaring informasi, menolak propaganda radikal, dan menggunakan media sosial secara bijak serta bertanggung jawab.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, atau penyebaran angket kepada mahasiswa dan dosen. Dengan demikian, kajian mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menangkal radikalisme dapat memperoleh data empiris yang lebih mendalam dan menggambarkan kondisi nyata di lingkungan kampus.

Referensi

- Aryeno, Bellynda Shafira, Teguh Suratman, dan Riski Febria Nurita. 2022. "Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya penanggulangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai kejahatan terorisme (studi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)." *Bhirawa Law Journal* 3 (1): 74–81.
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2016. "Implementasi nilai-nilai pancasila bagi siswa di era globalisasi." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4 (2): 440–50.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Widya Aksara Press.
- Casey, Ashley, dan Javier Fernandez-Rio. 2019. "Cooperative learning and the affective domain." *Journal of Physical Education, Recreation & Dance* 90 (3): 12–17.
- Cogan, John, dan Ray Derricott. 2014. *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education*. Routledge.
- Ennis, Robert H. 2018. "Critical thinking across the curriculum: A vision." *Topoi* 37 (1): 165–84.
- Fajri, Iwan, Rusli Yusuf, dan Mohd Zailani Mohd Yusoff. 2021. "Model pembelajaran project citizen sebagai inovasi pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan abad 21." *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan Dan Penelitian* 2 (3): 105–18.
- Fitri, Nur Laily, Usiono Usiono, Chalijah Adha, Izzatunnisa Izzatunnisa, dan Saidatul Fadhilah Nasution. 2023. "Pentingnya penerapan komunikasi efektif dalam konteks pendidikan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (6): 5241–51.

- Hidayat, A. 2025. "Pemahaman dan Pencegahan Radikalisme dalam Dunia Pendidikan Islam." *Jurnal El-Huda* 16 (02): 1–6.
- Indonesia, Seluruh. 2017. "Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia. kbbi. kemdikbud. go. id.*
- Kolb, Alice, dan David Kolb. 2018. "Eight important things to know about the experiential learning cycle." *Australian educational leader* 40 (3): 8–14.
- Lensa, Rejeki, Muhammad Jufni, dan Yusuf Hadijaya. 2025a. "Community Engagement dalam Pendidikan Multikultural." *ALACRITY: Journal of Education*, 288–301.
- Lensa, Rejeki, Muhammad Jufni, dan Yusuf Hadijaya. 2025b. "Community Engagement dalam Pendidikan Multikultural." *ALACRITY: Journal of Education*, 288–301.
- Nurul'Ainy, Zuhria. 2021. "Dampak Aplikasi Pendidikan Karakter pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi." *PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan* 9 (2): 111–17.
- Pramanda, Anggi Yoga, Moh Muchtarom, dan Rima VP Hartanto. 2018. "Penguatan Etika Digital pada Siswa untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (Studi SMA/SMK di Surakarta)." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 21 (2): 1–13.
- Rahmatiani, Lusiana. 2020. "Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa." *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan ISSN 2715: 467X*.
- Rahmawati, Siti, dan Tri Joko Raharjo. 2025. "INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA SISWA SD KELAS 4 DI SEKOLAH INDONESIA MAKKAH." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10 (01): 221–42.
- Rustandi, Ridwan. 2024. "Peran strategis Duta Damai Dunia Maya (DDDM) BNPT RI dalam menangkal radikalisme digital melalui pendekatan dakwah moderat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 6 (2): 259–82.
- Sanjaya, Dr H. Wina. 2006. *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*.
- Sardiman, Arief M. 2011. *Interaksi dan motivasi belajar mengajar*.
- Syamzaimar. 2025. *Pendidikan Kewarganegaraan, Implementasi Pengamalan Islam*. PT. Indragiri Dot Com.
- Winarno, Dwi. 2006. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*.